



KEPALA DESA AIR BELO
KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DESA AIR BELO
NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AIR BELO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 30 Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nnomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Desa Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
17. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 10 Seri E);
19. Peraturan Desa Air Belo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Air Belo Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Air Belo Tahun 2019 Nomor 4 Seri B);

20. Peraturan Desa Airbelo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Air belo Nomor 03 Seri B);
21. Peraturan Desa Airbelo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Air Belo Nomor 6 Seri A);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIR BELO
Dan
KEPALA DESA AIR BELO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA AIR BELO TENTANG PENYERTAAN
MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA
TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Air Belo yang berkedudukan di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa Air Belo
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Air Belo
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Air Belo
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "BUKIT KELUPANG JAYA".
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah Desa antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa Air Belo yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Air Belo untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Belo, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa Air Belo.
8. Aset Desa adalah barang milik Desa Air Belo yang berasal dari kekayaan asli Desa Air Belo, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten/ kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa Air Belo.

10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah
13. badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II ASA DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal berasaskan asas :

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat;

b. Penguatan BUM Desa;

c. Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan

d. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

1. Penyertaan Modal kepada BUMDesa dari Pemerintahan Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
2. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Sumber Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
4. Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUMDes.

BAB IV HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUM Desa merupakan Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Hal-hal yang dibuat sebelum ditetapkannya Peraturan Desa ini tetap berlaku dan menyesuaikan ketentuan yang ada.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Air Belo.

Ditetapkan di Desa Air Belo
pada tanggal 31 Desember 2021



KEPALA DESA AIR BELO,

BENY ASBANDI, SE

Diundangkan di Desa Air Belo
Pada tanggal 03 Januari 2022



YOGA RIANSYAH

LEMBARAN DESA AIR BELO TAHUN 2021 NOMOR 07 SERI C